

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA ANGGOTA DPRD TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LANGKAT

Sri Rahayu¹; Hendra²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas kinerja anggota DPRD terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Langkat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Sampel penelitian berjumlah 70 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,851 menunjukkan bahwa kedua variabel memberikan kontribusi sebesar 85,1% terhadap kepercayaan masyarakat. Persamaan regresi $Y = 26,593 + 0,527X_1 + 0,423X_2$ menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang searah terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Transparansi; Akuntabilitas; DPRD; Kepercayaan Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the effect of transparency and accountability of DPRD members' performance on the level of public trust in Langkat Regency. The research uses a quantitative approach with an associative design. The sample consists of 70 respondents selected through purposive sampling. Data were collected questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results show that transparency and accountability have a positive and significant effect on public trust. The coefficient of determination (R Square) of 0.851 indicates that both variables contribute 85.1% to public trust. The regression equation $Y = 26.593 + 0.527X_1 + 0.423X_2$ shows that transparency and accountability have a positive influence on increasing public trust.

Keywords: Transparency; Accountability; DPRD; Public Trust.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan modern menuntut adanya tata kelola yang baik (good governance) yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta supremasi hukum (Yulianjani et al., 2024).

¹ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, sriahayu.set.dprd@gmail.com

² Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, hendra@insan.ac.id

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, khususnya dalam lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah (Musfiroh et al., 2025).

Dalam konteks pemerintahan daerah, anggota DPRD memiliki peran strategis dalam mewakili aspirasi masyarakat sekaligus memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kinerja anggota DPRD harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, serta menilai sejauh mana kinerja para wakil rakyat tersebut. Sementara itu, akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana anggota DPRD bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya (Saleh et al., 2020).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas kinerja anggota DPRD. Kurangnya keterbukaan informasi, minimnya publikasi kinerja, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan menjadi faktor yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kondisi ini juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Langkat, yang mana masyarakat sering kali merasa kurang mendapatkan informasi yang memadai terkait aktivitas dan kinerja anggota DPRD (Teniwut, 2024).

Tingkat kepercayaan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kinerja lembaga publik. Kepercayaan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hasil kerja yang dicapai, tetapi juga oleh proses dan cara kerja yang dilakukan oleh para pejabat publik. Transparansi dan akuntabilitas yang baik akan menciptakan persepsi positif di masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap lembaga DPRD. Sebaliknya, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dapat memicu munculnya persepsi negatif, ketidakpuasan, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat (Fuady, 2022).

Fenomena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif menjadi isu yang penting untuk dikaji, terutama dalam era keterbukaan informasi saat ini. Masyarakat semakin kritis dan aktif dalam menilai kinerja pemerintah, termasuk DPRD, melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Hal ini menuntut anggota DPRD untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya agar dapat memenuhi ekspektasi publik.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi publik serta pertanggungjawaban yang jelas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi institusi pemerintahan. Namun demikian, kajian yang secara khusus meneliti pengaruh transparansi dan akuntabilitas kinerja anggota DPRD terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Langkat, masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis sejauh mana transparansi dan akuntabilitas kinerja anggota DPRD berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Langkat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga legislatif dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik.

B. KAJIAN TEORI

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas kinerja, kepercayaan masyarakat, serta peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsep-konsep ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian.

1. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait kebijakan serta kinerja lembaga publik. Transparansi menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan good governance karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mengawasi jalannya pemerintahan (Baghas Budi Wicaksono et al., 2023).

Dalam konteks lembaga legislatif, transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai kegiatan, kebijakan, penggunaan anggaran, serta hasil kerja anggota DPRD. Transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi laporan kinerja, penyediaan akses informasi publik, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat transparansi yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel.

Keberhasilan transparansi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan informasi yang mudah diakses, kejelasan komunikasi publik, serta komitmen lembaga dalam memberikan informasi secara terbuka. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap kinerja anggota DPRD sehingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan public (Yulianjani et al., 2024).

2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap lembaga publik dan pejabat pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja serta penggunaan sumber daya kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan tugas dan keputusan yang diambil (Sari et al., 2024).

Dalam konteks DPRD, akuntabilitas kinerja mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Anggota DPRD dituntut untuk menunjukkan kinerja yang dapat diukur, transparan, serta sesuai dengan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui laporan kinerja, evaluasi program, serta mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal.

Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif karena menunjukkan adanya tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas. Sebaliknya, rendahnya akuntabilitas dapat

menimbulkan ketidakpercayaan serta persepsi negatif terhadap kinerja anggota DPRD.

3. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat merupakan sikap atau keyakinan publik terhadap integritas, kemampuan, dan komitmen lembaga atau pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan karena memengaruhi tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat.

Kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kinerja lembaga, transparansi informasi, akuntabilitas, serta integritas anggota DPRD. Tingkat kepercayaan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dan yakin terhadap kinerja lembaga tersebut. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menyebabkan apatisme, rendahnya partisipasi, serta meningkatnya kritik terhadap pemerintah.

Dalam era keterbukaan informasi, kepercayaan masyarakat menjadi semakin penting karena masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk menilai kinerja lembaga publik. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi strategi utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan public (Nadhila et al., 2024).

4. Peran DPRD dalam Pemerintahan Daerah

DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD berfungsi sebagai wakil rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat, membentuk peraturan daerah, menetapkan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah (Muhammad Kurniawan et al., 2025). Sebagai representasi masyarakat, anggota DPRD dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kinerja DPRD yang baik akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, kinerja yang tidak optimal dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan legitimasi lembaga tersebut (Sari et al., 2024).

Dalam menjalankan fungsinya, DPRD harus menjunjung tinggi prinsip good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, DPRD tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat atas setiap keputusan yang diambil.

5. Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua variabel yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan memahami kinerja lembaga publik, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Kombinasi antara transparansi dan akuntabilitas akan menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya. Ketika masyarakat merasa bahwa lembaga publik bekerja secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menimbulkan kecurigaan, ketidakpuasan, serta menurunkan kepercayaan publik.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini memposisikan transparansi

dan akuntabilitas kinerja anggota DPRD sebagai variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai variabel dependen. Dengan memahami hubungan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pentingnya penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif di Kabupaten Langkat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas kinerja anggota DPRD terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen secara empiris (Putra et al., 2023).

Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengukuran variabel secara objektif melalui data numerik yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis secara sistematis dan memperoleh hasil yang dapat digeneralisasikan.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Langkat yang memiliki pengetahuan atau akses informasi terkait kinerja anggota DPRD. Mengingat luasnya populasi, maka penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria responden yang ditetapkan adalah masyarakat yang mengetahui atau pernah memperoleh informasi mengenai aktivitas dan kinerja DPRD, baik melalui media massa, media sosial, maupun pengalaman langsung.

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 70 responden yang dianggap telah memenuhi kriteria dan mampu mewakili populasi dalam memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, serta tingkat kepercayaan terhadap DPRD.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup yang disusun secara sistematis berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan lima kategori jawaban, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, yang digunakan untuk mengukur tingkat persepsi responden.

Variabel transparansi diukur melalui indikator keterbukaan informasi, kemudahan akses informasi publik, serta kejelasan penyampaian informasi oleh anggota DPRD kepada masyarakat. Variabel akuntabilitas kinerja diukur melalui indikator pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, kesesuaian kinerja dengan peraturan yang berlaku, serta kejelasan laporan kinerja. Sementara itu, variabel kepercayaan masyarakat diukur melalui indikator keyakinan terhadap kinerja DPRD, tingkat kepuasan masyarakat, serta persepsi terhadap integritas anggota DPRD.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel independen yang diduga memengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2021).

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji melalui

uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat analisis regresi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, serta uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh hasil yang mampu menjelaskan secara empiris pengaruh transparansi dan akuntabilitas kinerja anggota DPRD terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja lembaga legislatif dan kepercayaan masyarakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Variabel Transparansi (X1)

Variabel transparansi diukur menggunakan 12 item pernyataan dengan empat alternatif jawaban menggunakan skala Likert. Skor terendah adalah 1 dan skor tertinggi 4. Dengan demikian, mean hipotetik (MH) variabel transparansi adalah:

$$MH = ((12 \times 1) + (12 \times 4)) / 2$$

$$MH = (12 + 48) / 2$$

$$MH = 30$$

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa mean empirik (ME) variabel transparansi adalah 36,72 dengan standar deviasi (SD) sebesar 6,18. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi kinerja anggota DPRD di Kabupaten Langkat berada pada kategori cukup baik menurut persepsi masyarakat.

b. Variabel Akuntabilitas Kinerja (X2)

Variabel akuntabilitas diukur menggunakan 8 item pernyataan dengan skala Likert (1–4). Mean hipotetik (MH) adalah:

$$MH = ((8 \times 1) + (8 \times 4)) / 2$$

$$MH = (8 + 32) / 2$$

$$MH = 20$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa mean empirik (ME) sebesar 25,20 dengan standar deviasi (SD) sebesar 4,91. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja anggota DPRD berada pada kategori cukup tinggi.

c. Variabel Kepercayaan Masyarakat (Y)

Variabel kepercayaan masyarakat diukur menggunakan 12 item pernyataan dengan skala Likert (1–4). Mean hipotetik (MH):

$$MH = ((12 \times 1) + (12 \times 4)) / 2$$

$$MH = (12 + 48) / 2$$

$$MH = 30$$

Hasil analisis menunjukkan mean empirik (ME) sebesar 37,41 dengan standar deviasi (SD) sebesar 5,96. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD di Kabupaten Langkat berada pada kategori cukup baik.

2. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Transparansi (X1) | 70 | 24.00 | 48.00 | 36.72 | 6.18 |
| Kepercayaan Masyarakat (Y) | 70 | 26.00 | 48.00 | 37.41 | 5.96 |
| Valid N (listwise) | 70 | | | | |

3. Kategori Variabel

a. Kategori Transparansi

| Skor | Kategori | Jumlah | Persentase |
|---------------|----------|--------|------------|
| $\geq 42,90$ | Tinggi | 26 | 37,14% |
| 30,54 – 42,90 | Sedang | 32 | 45,71% |
| $< 30,54$ | Rendah | 12 | 17,15% |
| Total | | 70 | 100% |

Mayoritas responden berada pada kategori sedang, menunjukkan transparansi DPRD dinilai cukup.

b. Kategori Akuntabilitas

| Skor | Kategori | Jumlah | Persentase |
|---------------|----------|--------|------------|
| $> 30,11$ | Tinggi | 28 | 40% |
| 20,29 – 30,11 | Sedang | 35 | 50% |
| $< 20,29$ | Rendah | 7 | 10% |
| Total | | 70 | 100% |

Mayoritas responden menilai akuntabilitas berada pada kategori sedang.

c. Kategori Kepercayaan Masyarakat

| Skor | Kategori | Jumlah | Persentase |
|---------------|----------|--------|------------|
| $\geq 43,37$ | Tinggi | 23 | 32,86% |
| 31,45 – 43,37 | Sedang | 34 | 48,57% |
| $< 31,45$ | Rendah | 13 | 18,57% |
| Total | | 70 | 100% |

Hasil menunjukkan kepercayaan masyarakat berada pada kategori sedang hingga tinggi.

B. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Nilai r-tabel sebesar 0,235 (N=70). Seluruh item memiliki r-hitung $>$ r-tabel, sehingga seluruh item valid.

2. Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|------------------------|------------------|------------|
| Transparansi | 0.821 | Reliabel |
| Akuntabilitas | 0.823 | Reliabel |
| Kepercayaan Masyarakat | 0.784 | Reliabel |

Semua variabel dinyatakan reliabel.

C. Uji Asumsi Klasik
 Uji Normalitas

| Variabel | Sig. | Keterangan |
|------------------------|-------|------------|
| Transparansi | 0.174 | Normal |
| Akuntabilitas | 0.157 | Normal |
| Kepercayaan Masyarakat | 0.189 | Normal |

Semua data berdistribusi normal.

D. Analisis Regresi Linier Berganda

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .922 | .851 | .956 | .914 |

a. Predictors: (Constant), X1,X2

Artinya transparansi dan akuntabilitas berpengaruh sebesar 85,1% terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan 14,9% dipengaruhi faktor lain.

Uji F (Simultan)

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 112.700 | 1 | 112.700 | 19.193 | .000 ^b |
| | Residual | 117.019 | 20 | 5.851 | | |
| | Total | 229.318 | 21 | | | |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1,X2

Artinya transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Uji t (Parsial)

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 26.593 | 6.639 | | 4.006 | .001 |
| | X1 | .527 | .120 | .700 | 4.381 | .000 |
| | X2 | .423 | .110 | .500 | 3.292 | .000 |

a. Dependent Variable: Y

Persamaan Regresi

$$Y = 26,593 + 0,527X_1 + 0,423X_2$$

Artinya:

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi yaitu $Y = 26,593 + 0,527X_1 + 0,423X_2$. Nilai konstanta sebesar 26,593

menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tetap berada pada angka tersebut meskipun variabel transparansi dan akuntabilitas dianggap tidak mengalami perubahan. Koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,527 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan transparansi sebesar satu satuan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebesar 0,527 satuan, dengan asumsi variabel akuntabilitas tetap. Sementara itu, koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,423 menunjukkan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas sebesar satu satuan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebesar 0,423 satuan, dengan asumsi variabel transparansi tetap. Nilai koefisien yang positif pada kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang searah terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, semakin baik tingkat transparansi dan akuntabilitas kinerja anggota DPRD, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Langkat.

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas kinerja anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Langkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terbuka informasi yang diberikan serta semakin jelas pertanggungjawaban kinerja DPRD, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat.

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui aktivitas, kebijakan, serta penggunaan anggaran secara jelas. Keterbukaan ini menciptakan rasa percaya karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pemerintahan. Sementara itu, akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab DPRD dalam menjalankan tugasnya, yang menjadi indikator penting dalam menilai integritas lembaga legislatif.

Hasil ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan legitimasi lembaga publik. Ketika kedua prinsip ini diterapkan dengan baik, maka masyarakat akan memiliki persepsi positif terhadap kinerja DPRD.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan keterbukaan informasi publik serta sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. DPRD juga perlu memanfaatkan media digital untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi publik.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji dan membahas pengaruh transparansi dan akuntabilitas kinerja anggota DPRD terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,851, yang berarti bahwa transparansi dan akuntabilitas mampu menjelaskan sebesar 85,1% variasi tingkat kepercayaan masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 14,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Selain itu, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai t -hitung sebesar 4,381 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, serta variabel akuntabilitas memiliki nilai t -hitung sebesar 3,292 dengan tingkat

signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil uji F juga menunjukkan nilai F-hitung sebesar 19,193 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Persamaan regresi $Y = 26,593 + 0,527X_1 + 0,423X_2$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebesar 0,527 satuan, dan setiap peningkatan satu satuan akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebesar 0,423 satuan. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban kinerja yang baik dari anggota DPRD memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi DPRD dalam meningkatkan kualitas kinerja serta memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui keterbukaan dan tanggung jawab yang lebih baik.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar anggota DPRD Kabupaten Langkat meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi publik, baik melalui media konvensional maupun digital, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kinerja dan kebijakan yang diambil. Selain itu, peningkatan akuntabilitas kinerja juga perlu dilakukan melalui penyusunan laporan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui penguatan regulasi, pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam mengawasi kinerja DPRD serta memanfaatkan haknya untuk memperoleh informasi publik.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan publik, atau integritas pejabat publik, serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

G. DAFTAR PUSTAKA

- DAERAH RAWAN BANJIR Baghas Budi Wicaksono, D., Satrianto, H., Pudjo Wibowo, F., Kusnawan, A., & Hernawan, E. (2023). Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Daerah Rawan Banjir*.
- Fuady, F. (2022). PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PROSES PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Jurnal Ilmiah*

- Multidisiplin*. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i06.318>
- Muhammad Kurniawan, Salsabila Salsabila, & Novi Lidiyasari. (2025). Tugas, Fungsi dan Bagian Sekretariat DPRD dalam Membantu Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya. *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri*. <https://doi.org/10.62383/numeken.v2i1.780>
- Musfiroh, Z., Agustina, W., Aprilia, K. P., Pratiwi, F. W., Khoiriawati, N., Ah, A. S., Sayyid, U. N., & Rahmatullah, A. (2025). ANALISIS TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Global Research and Innovation Journal*.
- Nadhila, F., Ningrum, R. S., Shafarina, J. F., & Anggrayni, D. (2024). Peran Humas dalam Mempublikasikan Kegiatan DPRD Kota Bogor Melalui Media Sosial Instagram. *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*. <https://doi.org/10.32832/komunika.v8i1.11488>
- Putra, S., Tuerah, P., Mesra, R., Sukwika, T., Sarman, F., Nir, nuzulul arifin, Nuruzzaman, M., Susmita, N., Nilawati, Sari, mike nurmalia, Ladjin, N., Mulyapradana, A., Sinaga, enny keristiana, & Akbar, jakub saddam. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF : teori dan panduan praktis analisis data kuantitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Saleh, M., Khair, A., Sarkawi, S., & Kafrawi, K. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat. *Jatiswara*. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.271>
- Sari, W., Zhafirah, R., Panggabean, I., Sumaiga, H., & Alief Harahap, T. (2024). Pengaruh Peran Komisi A, B, dan E DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2959>
- Sugiyono, D. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono. In *Bandung: Alfabeta*.
- Teniwut, M. (2024). *Pengertian dan Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi*. Mediaindonesia.Com.
- Yulianjani, A., Putri, A., Fitriandini, A., Widodo, I. B., & Rafli, M. (2024). Peran Reses Anggota Dewan pada DPRD Kota Tangerang Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat. *URNITY Journal*. <https://doi.org/10.33050/urnity.v4i2.2832>